

Lisbet
Adirini Pujayanti
Humphrey Wangke

TANTANGAN DAN PELUANG DIPLOMASI EKONOMI PRESIDEN JOKO WIDODO

Penyunting:
Humphrey Wangke



**Penyunting:
Humphrey Wangke**

TANTANGAN DAN PELUANG DIPLOMASI EKONOMI PRESIDEN JOKO WIDODO

**Lisbet
Adirini Pujayanti
Humphrey Wangke**



Diterbitkan oleh:
P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika
2015



Judul:

Tantangan dan Peluang Diplomasi Ekonomi Presiden Joko Widodo

Perpustakaan Nasional:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

xiii+110 hlm.; 15.5x23 cm

ISBN: 978-602-1247-29-7

Cetakan Pertama, 2015

Penyunting:

Humphrey Wangke

Penulis:

Lisbet

Adirini Pujayanti

Humphrey Wangke

Penyelia Aksara:

Abdul Mukhit Kd

Desain Sampul:

Abue

Tata Letak:

Zaki

Diterbitkan oleh:

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)

Sekretariat Jenderal DPR RI

Gedung Nusantara I Lt. 2

Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270

Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Bersama:

Azza Grafika, Anggota IKAPI DIY, No. 078/DIY/2012

Kantor Pusat:

Jl. Seturan II CT XX/128 Yogyakarta

Telp. +62 274-6882748

Perwakilan Jabodetabek:

Perum Wismamas Blok E1 No. 43-44, Cinangka, Sawangan, Kota Depok

Telp. (021) 7417244

Sanksi Pelanggaran Pasal 72**Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

KATA PENGANTAR PENYUNTING

Tahun 2014 diwarnai oleh pertumbuhan ekonomi global yang tidak stabil, yang tidak saja dialami oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan Jepang; tetapi juga dialami oleh negara-negara berkembang seperti Brazil, serta beberapa negara anggota ASEAN seperti Indonesia. Namun di lain pihak, terdapat sejumlah negara yang pertumbuhannya meningkat, seperti Thailand dan Vietnam. Kondisi perekonomian global tersebut ini merupakan dampak dari berbagai perkembangan yang terjadi baik di kawasan regional maupun global seperti krisis yang kembali melemahkan perekonomian di kawasan Euro setelah sebelumnya berhasil bangkit pasca krisis ekonomi yang melanda pada tahun 2013. Hal yang sama terjadi di Jepang, ketika kebijakan pemerintah untuk menaikkan pajak penjualan telah mengakibatkan turunnya investasi serta menurunkan daya beli masyarakatnya. Selain itu, adanya peningkatan jumlah pasokan minyak akibat meningkatnya *supply* minyak negara non OPEC, khususnya Amerika Serikat, ditengah melemahnya permintaan akibat perlambatan ekonomi negara *emerging market*, terutama Tiongkok berdampak pada turunnya harga minyak dunia.

Penelitian ini dilaksanakan sebagai bentuk respon peneliti Tim Hubungan International P3DI yang terdiri dari Humphrey Wangke, Adirini Pujayanti dan Lisbet Sihombing untuk mengetahui lebih jauh bagaimana respon pemerintah Presiden Joko Widodo terhadap gejolak perekonomian dunia yang sangat mempengaruhi kinerja perekonomian Indonesia. Fokus penelitian ini mencakup tiga hal penting yaitu infrastruktur, perdagangan dan pariwisata. Untuk memudahkan analisis terhadap respon Presiden Joko Widodo, penelitian ini secara sengaja memilih Provinsi Bali dan Provinsi Kepulauan Riau sebagai objek penelitian. Kedua provinsi ini secara geografis berbeda yaitu Bali sebagai provinsi pulau dan Kepulauan Riau sebagai provinsi kepulauan. Dengan perbedaan karakter geografis, kedua pulau ini ternyata memberikan respon

positif terhadap keinginan pemerintah untuk meningkatkan kinerja perekonomian pemerintah terutama untuk sektor perdagangan, pariwisata dan infrastruktur.

Indonesia dengan kepemimpinan yang baru di bawah Presiden Joko Widodo, tentu saja diharapkan dapat membawa perubahan khususnya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik yang tidak hanya dirasakan oleh golongan tertentu tetapi juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Presiden Joko Widodo menyatakan akan merealisasikan ideologi Trisakti yaitu menjadikan Indonesia negara yang berdaulat dalam politik; berdikari dalam ekonomi; serta berkepribadian dalam kebudayaan. Karena itu, untuk mencapai perekonomian yang berbasis kerakyatan diperlukan suatu terobosan dalam hal diplomasi ekonomi Indonesia dengan mitranya baik secara bilateral, regional maupun multilateral. Hal ini sejalan dengan 9 (sembilan) agenda prioritas (NAWACITA) pemerintah periode 2015 – 2019 yang salah satunya adalah untuk mewujudkan suatu negara yang berdikari dalam ekonomi dengan cara menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik sesuai dengan pencerminan dari ideologi Trisakti.

Sejalan dengan hal ini, Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan-perwakilan RI akan menjadi ujung tombak dari pelaksanaan diplomasi ekonomi. Menteri Luar Negeri RI dalam Pernyataan Pers Tahunan tahun 2015 menyatakan bahwa berdasarkan visi dan misi Presiden Joko Widodo, politik luar negeri Indonesia akan diprioritaskan kepada menjaga kedaulatan Indonesia dengan memfokuskan kepada diplomasi perbatasan; peningkatan perlindungan terhadap WNI dan BHI; serta peningkatan diplomasi ekonomi.

Dalam hal diplomasi ekonomi, Indonesia akan memprioritaskan kebijakannya pada peningkatan diplomasi ekonomi yang berorientasi pada kepentingan rakyat Indonesia. Hal ini menjadikan Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan Indonesia di luar negeri sebagai pelaksana diplomasi ekonomi, yang diwakili oleh para diplomatnya, tidak hanya sebagai *marketers*, tetapi juga sebagai *opportunity seekers* bagi berbagai peluang baik berupa perdagangan, turisme, serta infrastruktur. Diplomasi ekonomi secara singkat dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk mempromosikan potensi ekonomi suatu negara. Diplomasi ekonomi juga dapat diartikan sebagai upaya pemerintah beserta segenap pemangku kepentingan yang terlibat dalam suatu kegiatan di bidang ekonomi, yang mencakup perdagangan

komoditas, investasi, pariwisata, ketenagakerjaan dan kerja sama teknik yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat, mendukung pembangunan nasional dan memajukan kepentingan Indonesia di kancah global.

Peran perwakilan Indonesia sangat strategis dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi. Pejabat di perwakilan Indonesia harus memiliki kemampuan *market intelligence* untuk melihat potensi dan peluang kerja sama di negara akreditasinya. Para diplomat juga dituntut untuk bisa menjalankan perannya sebagai *trade policy intelligence* dengan cara pengamatan terhadap kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah setempat dan menyampaikan saran kepada pusat terkait kebijakan yang dapat Indonesia ambil dalam menyikapi kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah setempat. Jika kepentingan ekonomi Indonesia berpotensi terancam dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tersebut, para diplomat kemudian harus dapat berperan sebagai negosiator untuk membela kepentingan Indonesia.

Konstruksi tulisan ini dibagi dalam tiga bagian. Pada bagian pertama Lisbet Sihombing meneliti tentang potensi pariwisata Indonesia. Didalam analisisnya, Lisbet menyebutkan bahwa pariwisata Indonesia mempunyai potensi besar untuk turut menyumbang terhadap produk domestik bruto Indonesia. Target kunjungan wisman sebesar 20 juta wisatawan manca negara hingga tahun 2019 memang sangat ambisius, tetapi bukan tidak mungkin akan tercapai. Paling tidak Indonesia berpeluang meningkat jumlah penerimaan dari sektor pariwisata meskipun jumlah wisatawan manca negara sulit tercapai. Penelitian yang dilakukan Studi yang dilakukan oleh Organisasi Pariwisata Dunia PBB (*United Nations World Tourism Organization/UNWTO*) dan *World Tourism and Travel Council (WTTC)* tahun 2011 memprediksi bahwa fasilitasi visa dapat menjadi jawaban atas penciptaan lapangan kerja saat belum pulihnya perekonomian dunia. Relaksasi visa diperkirakan akan meningkatkan jumlah wisatawan dunia menjadi 110 juta orang atau kenaikan sebesar 16 persen, penciptaan 5,1 juta pekerjaan, dan devisa 206 miliar dollar AS. Sejalan dengan hal ini, kebijakan pemerintah dengan pemberian Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) bagi 5 negara yakni; Australia, Jepang, Korea, Cina, dan Rusia yang mulai diterapkan tahun 2015 merupakan salah satu *trigger* bagi meningkatnya jumlah wisatawan dari negara tersebut sehingga target jumlah wisatawan

manca negara yang telah ditetapkan pemerintah untuk 5 (lima) tahun mendatang akan dapat tercapai.

Pada bagian kedua, Adirini Pujayanti meneliti tentang perdagangan. Di bidang perdagangan, hasil riset memperlihatkan bahwa di masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo diplomasi ekonomi Indonesia akan mengalami perubahan signifikan karena Indonesia memerlukan diplomasi ekonomi yang kuat guna menopang pertumbuhan domestik. Diplomasi Indonesia akan terkoneksi dengan kepentingan rakyat, akan bersifat membumi, dilakukan secara tegas dan bermartabat. Pemerintahan Presiden Joko Widodo berusaha memanfaatkan peran diplomasi ekonominya pada upaya memperluas pasar tradisional. Selama ini ekspor dari Indonesia cenderung terfokus pada pasar-pasar tradisional seperti Jepang, Amerika, Singapura, Taiwan, Korea serta negara-negara di kawasan di Eropa Barat seperti Jerman, Belanda, Inggris, Perancis, serta Italia. Dengan tidak hanya berorientasi pada pasar tradisional, pasar-pasar non tradisional seperti negara non Uni Eropa; Skandinavia, Turki, Kanada, Meksiko, Swedia, Panama, Portugal, serta Irlandia berpotensi bagi peningkatan nilai perdagangan dan investasi bagi Indonesia. Negara-negara di kawasan Amerika Latin serta Eropa Timur dan Tengah juga merupakan pasar alternatif bagi produk ekspor dari Indonesia. Peningkatan nilai perdagangan dan investasi dengan pasar non-tradisional dan pasar alternatif hendaknya dijalankan dengan tetap mempertahankan hubungan yang telah terjalin dengan baik dengan pasar tradisional. Dengan berubahnya paradigma pangsa pasar bagi pemasaran produk ekspor Indonesia dari pasar tradisional ke pasar non-tradisional serta pasar alternatif, nilai perdagangan.

Bagian ketiga, atau terakhir dari buku ini membahas tulisan Humphrey Wangke tentang pembangunan infrastruktur yang menjadi dasar dari keberhasilan semua program pembangunan di Indonesia. Di dalam analisisnya penulis berpendapat bahwa kondisi infrastruktur di Indonesia masih memerlukan peningkatan kapasitas bukan hanya dalam bentuk fisik tetapi juga non-fisik yaitu kerja sama antar lembaga pemerintahan mengingat banyaknya lembaga yang terlibat didalamnya. Indonesia memerlukan anggota yang tidak kecil jika ingin mengejar ketertinggalannya dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan, Untuk itu penelitian ini mengusulkan agar pemerintah Presiden Joko Widodo memanfaatkan peluang yang

tercipta dari berbagai kerjasama yang sudah digalang selama ini seperti WTO, APEC, ASEAN, kerjasama dalam bentuk *Partnership*, pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus dan terakhir kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral menjadi andalan Presiden Joko Widodo karena sangat mudah dalam melakukan kordinasi. Tiongkok dan Jepang menjadi pilihan utama karena kedua negara sedang terlibat dalam persaingan mencari lahan investasi.

Sesuai dengan target ambisius Presiden Joko Widodo, Perwakilan Indonesia di luar negeri mempunyai tugas berat untuk aktif mencari masukan baik tentang potensi ekonomi Indonesia maupun potensi pasar di luar negeri. Potensi pasar dalam negeri harus diketahui secara tepat untuk memudahkan pemasaran kepada investor luar, sebaliknya potensi pasar luar negeri juga harus diketahui secara tepat agar Indonesia dapat memanfaatkannya secara tepat pula. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa baik Provinsi Bali maupun kepulauan Riau memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo. Potensi pariwisata, perdagangan maupun infrastruktur kedua provinsi masih sangat memerlukan pasar luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di kedua provinsi. Masalahnya kini sangat bergantung bagaimana sinergi yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah bisa terwujud sehingga cita-cita untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen pada akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo dapat tercapai.

Pada akhirnya, tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik yang di Jakarta, maupun di Provinsi Bali dan Provinsi Riau, yang dengan segala kerendahan hati mau menerima kehadiran kami untuk melakukan wawancara dan diskusi yang sangat informatif. Melalui forum semacam ini tim penelitian mendapat masukan yang sangat berharga untuk kelengkapan analisis dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi alat kelengkapan DPRRI yang terkait dengan topik penelitian ini.

Jakarta, Agustus 2015

Penyunting,
Humphrey Wangke

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENYUNTING	iii
DAFTAR ISI.....	viii
PROLOG.....	xi

BAGIAN KESATU

DIPLOMASI EKONOMI PRESIDEN JOKO WIDODO DI BIDANG PARIWISATA

oleh: Lisbet

BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang	2
B. Permasalahan dan Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Kerangka Pemikiran.....	6
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	8
BAB III PEMBAHASAN	10
A. Kondisi Pariwisata di Negara ASEAN.....	10
B. Kondisi Pariwisata di Indonesia.....	12
C. Peran Diplomat dalam Mempromosikan Pariwisata Indonesia.....	17
1. Regional	19
2. Bilateral.....	20
BAB IV PENUTUP.....	23
DAFTAR PUSTAKA.....	24

BAGIAN KEDUA

DIPLOMASI EKONOMI BIDANG PERDAGANGAN MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO

oleh: Adirini Pujayanti

BAB I PENDAHULUAN.....	29
A. Latar Belakang	29
B. Permasalahan Penelitian	31

C. Tujuan.....	31
D. Kerangka Teori	32
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	37
A. Metode.....	37
B. Cara Pengumpulan Data.....	37
C. Tempat dan Waktu.....	37
1. Provinsi Bali.....	37
2. Provinsi Riau.....	38
BAB III PEMBAHASAN.....	39
A. Diplomasi Ekonomi Bidang Perdagangan Pemerintahan Presiden Joko Widodo.....	39
B. Strategi Diplomasi Ekonomi Bidang Perdagangan.....	43
C. Beberapa Persoalan yang Patut Mendapat Perhatian	50
1. Kepentingan Usaha Kecil Mandiri	50
2. Menangkis Isu Negatif	51
a. Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan dan Karimun	52
b. Hambatan Ekspor Kayu dan Produk Pertanian	53
c. <i>Bargaining Power</i> dalam Kerja Sama Ekonomi.....	55
d. <i>Diplomacy Blind Spot</i>	56
BAB IV PENUTUP.....	59
A. Simpulan.....	59
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

BAGIAN KETIGA

DIPLOMASI EKONOMI PRESIDEN JOKO WIDODO DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

oleh: Humphrey Wangke

BAB I PENDAHULUAN.....	67
A. Latar Belakang	67
B. Permasalahan	69

C. Tujuan dan Kegunaan	70
D. Teori	70
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	74
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	75
A. Kondisi Infrastruktur di Provinsi Bali dan Provinsi Kepulauan Riau	75
1. Provinsi Bali	76
2. Provinsi Kepulauan Riau	79
B. Perbandingan Kondisi Infrastruktur di Indonesia dengan Negara Lain	81
C. Daya Saing Infrastruktur Indonesia di Kawasan.....	87
D. Diplomasi Ekonomi dalam Pembangunan Infrastruktur Indonesia.....	92
1. Pembentukan Badan Infrastruktur Nasional	92
2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Melalui Diplomasi	94
BAB IV KESIMPULAN	100
DAFTAR PUSTAKA	101
EPILOG	103
INDEKS	106
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	109

PROLOG

Tampilnya Presiden Joko Widodo sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara di Indonesia memberikan harapan baru bagi kemajuan diplomasi di Indonesia. Indikasi yang bisa ditampilkan di sini adalah kedatangan para kepala negara pada saat pelantikannya. Kedatangan para undangan itu bukan hanya memperlihatkan bahwa Indonesia telah menjadi negara yang disegani di dunia, paling tidak di kawasan Asia Pasifik, tetapi juga menunjukkan besarnya harapan negara-negara tersebut akan adanya perubahan dalam gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Harapan akan adanya perubahan itu muncul karena pelantikannya terjadi pada saat perekonomian dunia tengah menghadapi berbagai krisis yang berdampak ke semua negara.

Presiden Joko Widodo memperlihatkan optimismenya bahwa krisis ekonomi dunia saat ini bukan hambatan yang berarti untuk meningkatkan kinerja ekonomi Indonesia. Karena itu ia menargetkan bahwa pada akhir masa jabatannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 7 persen. Untuk mencapai hal itu, ia bukan hanya membenahi perekonomian dalam negeri, terutama yang berkaitan dengan masalah birokrasi, tetapi juga mendorong dunia diplomasi Indonesia sebagai garda terdepan dalam menghadapi persaingan perekonomian dunia yang semakin kompetitif. Untuk itulah ia mendorong Kementerian Luar Negeri Indonesia lebih aktif mencari peluang ekonomi di luar negeri. Presiden Joko Widodo tidak ingin diplomat bekerja untuk urusan seremonial belaka tetapi yang terpenting adalah menjadi “mata dan telinga” Indonesia di luar negeri.

Dari sekian banyak prioritas dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, penelitian ini fokus pada 3 aspek saja yaitu pariwisata, perdagangan dan infrastruktur. Ketiganya mempunyai tantangan yang besar dalam menghadapi gaya baru pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pariwisata mempunyai target dalam tempo 5 tahun ke depan

harus mampu menyerap 20 juta wisatawan manca negara, suatu jumlah yang sangat ambisius. tetapi hal ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo karena potensi pariwisata yang dimiliki Indonesia memang sangat beragam sesuai dengan kemajemukan suku bangsa di Indonesia. Hanya saja selama ini masih sangat terbatas dalam hal promosi sehingga tidak banyak negara yang tahu tentang hal itu. Ditetapkannya Batam, Jakarta dan Bali memperlihatkan bahwa ke tiga wilayah ini sudah sangat dikenal oleh wisatawan manca negara sehingga dari ketiga wilayah ini diharapkan akan terjadi persebaran kunjungan wisatawan manca negara di Indonesia.

Perdagangan juga menjadi sektor kunci dalam kemajuan perekonomian Indonesia karena langsung berkaitan dengan kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang yang mempunyai nilai jual secara internasional. Salah satu tantangan para diplomat Indonesia untuk memajukan dunia perdagangan di Indonesia adalah melakukan diversifikasi pasar ekspor. Indonesia selama ini sangat bergantung pada pasar tradisional seperti Eropa, AS, Jepang, Tiongkok, dan ASEAN. Pada saat negara-negara tujuan ekspor mengalami masalah dalam perekonomiannya maka dampaknya akan dirasakan Indonesia. Seperti yang terjadi di negara-negara Uni Eropa, krisis keuangan yang terjadi di Yunani telah mempengaruhi daya serap kawasan itu terhadap produk ekspor Indonesia. Sebaliknya yang terjadi di AS, membaiknya perekonomian negara itu telah berakibatnya kembalinya mata uang dolar ke negara asalnya sehingga mempengaruhi perekonomian Indonesia karena berdampak terhadap menurunnya nilai tukar rupiah. Melihat kondisi semacam ini sudah saatnya para diplomat Indonesia mengalihkan target ekspor produk Indonesia ke pasar non tradisional seperti Timur Tengah, Eropa Timur, Afrika dan Amerika Selatan.

Lebih dari segalanya, target pariwisata dan perdagangan Indonesia tidak akan tercapai jika kondisi infrastruktur di Indonesia tidak segera diperbaiki. Pelabuhan, jalan raya, bandara, listrik, air bersih, telekomunikasi merupakan contoh sarana infrastruktur di Indonesia yang perlu mendapat tanggapan serius para diplomat Indonesia. Terbatasnya dana pembangunan yang dimiliki pemerintah saat ini mendorong para diplomat untuk mencari investor asing yang mau menanamkan modalnya di Indonesia untuk

pembangunan infrastruktur tersebut. Persaingan sudah pasti akan terjadi, dan salah satunya adalah Tiongkok. Negara ini sedang membangun jalur sutera untuk memperlancar jalur perdagangannya dari Tiongkok sampai ke Eropa dan Afrika. Namun Indonesia sebenarnya dapat memanfaatkan proyek ambisius Tiongkok tersebut dengan mengajaknya untuk membangun pelabuhan atau bandara internasional di Indonesia. Tiongkok saat ini sedang bersaing dengan Jepang dalam melakukan ekspor “soft power” ke negara-negara di kawasan Asia Pasifik, karena itu Indonesia harus mampu memanfaatkan persaingan itu untuk keuntungan Indonesia.

Provinsi Bali dan Kepulauan Riau yang menjadi objek penelitian kali ini memperlihatkan antusiasnya terhadap program pembangunan Presiden Joko Widodo. Kedua provinsi ini telah mempersiapkan proyek-proyek pembangunan yang pantas untuk dikerjasamakan dengan pihak investor asing mengingat besarnya biaya yang diperlukan sementara pemerintah Indonesia belum mempunyai anggaran yang cukup untuk itu. Provinsi Kepulauan Riau kini dengan mempersiapkan berbagai program pembangunan mulai dari pengembangan pariwisata, peningkatan komoditas perdagangan sampai dengan pembangunan infrastruktur di sektor kelautan. Posisi geografis Provinsi Riau mendorong provinsi ini untuk terus membangun sarana transportasi di laut dan udara. Sementara Provinsi Bali berkonsentrasi pada sarana transportasi di darat dan laut untuk mengembangkan potensi ekonominya. Masalahnya kini berpulang pada kesungguhan Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan kapasitas ekonomi Indonesia dengan basis kerjasama luar negeri. Diplomasi ekonomi Indonesia harus lebih responsif dalam melihat potensi ekonomi setiap provinsi Indonesia. Sebaliknya para Bupati, Walikota dan Gubernur harus lebih kooperatif dengan memberikan berbagai informasi yang dimilikinya terkait dengan potensi ekonomi yang hendak dikembangkannya. Tanpa adanya sinergi yang luar biasa antara pemerintah pusat dan daerah maka semua harapan Presiden Joko Widodo tidak akan mudah tercapai.

EPILOG

Dunia memerlukan kerjasama internasional untuk memenuhi kebutuhan hidup dan eksistensi negara dalam tatanan pergaulan internasional. Kerja sama luar negeri juga dibutuhkan untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan yang merupakan dambaan semua negara di dunia. Terciptanya kerjasama internasional juga tidak terlepas dari pemahaman bahwa setiap negara pasti mempunyai kelebihan, kekurangan dan kepentingan yang berbeda sehingga mendorong terjadinya hubungan dan kerja sama internasional. Kerjasama ini dibentuk atas dasar saling membutuhkan dan saling menghormati.

Dalam konteks seperti itu, Presiden Joko Widodo menggalang kerjasama luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Kerjasama luar negeri ini dilakukan karena menyadari bahwa Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar untuk membangun Indonesia sesuai dengan program kerjanya yang tidak mungkin diharapkan dapat dipenuhi oleh dana APBN. Tampilnya Joko Widodo sebagai Presiden RI telah mengharuskan pada diplomat Indonesia untuk bekerja keras menggalang kerja sama luar negeri agar program pembangunan yang dijalankannya dapat berjalan sesuai yang dinginkannya. Banyak forum yang dapat dilakukan Indonesia untuk menggalang kerjasama luar negeri tersebut mulai dari yang bersifat bilateral sampai yang regional bahkan multilateral.

Kerjasama bilateral merupakan bentuk kerjasama antar dua negara. Kerjasama bilateral bertujuan untuk membina hubungan yang telah ada dan dapat dilakukan antara Indonesia dengan suatu negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Sedangkan kerjasama regional merupakan bentuk kerjasama antar-negara di dalam suatu kawasan seperti Asia Tenggara dalam bentuk ASEAN atau kawasan Asia Pasifik seperti APEC. Sedangkan kerjasama multilateral adalah kerjasama antar-negara yang tidak memperhitungkan kawasan. Seluruh negara di dunia bergabung

dalam suatu organisasi besar untuk melakukan pengaturan-pengaturan dalam hubungan antar-bangsa. PBB dan WTO adalah contoh dari organisasi multilateral ini.

Dari berbagai bentuk kerjasama tersebut, Presiden Joko Widodo nampaknya mempunyai keinginan untuk lebih mengembangkan kerjasama secara bilateral. Hal ini bisa dilihat dari keinginannya untuk memanfaatkan kemajuan perekonomian Tiongkok dan kemapanan perekonomian Jepang untuk mendapatkan modal bagi investasi di sektor perekonomian yang dibutuhkan Indonesia. Apalagi kedua negara ini sedang terlibat dalam persaingan untuk mencari pengaruh di negara-negara kawasan Asia Pasifik. Misalnya dalam pembangunan sarana transportasi darat kereta api cepat, persaingan kedua negara sangat terlihat, dan Indonesia berusaha mengambil manfaat dari persaingan tersebut.

Apapun pilihan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, Indonesia memang sangat membutuhkan kerjasama luar negeri ini untuk menutupi kekurangan dana yang dimiliki pemerintah. Untuk itulah Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Luar Negeri untuk menugaskan para diplomatnya untuk mencari peluang kerjasama dengan negara penempatannya. Kondisi ini merupakan sesuatu yang baru karena diplomat Indonesia tidak lagi bekerja untuk urusan seremonial tetapi mencari dan mengajak mitra dagang dari negara penempatannya untuk bekerja sama dengan Indonesia. Sektor perdagangan, pariwisata, investasi dan infrastruktur menjadi prioritas Presiden Joko Widodo.

Dalam kerangka program kerjasama seperti itu, Provinsi Bali dan Kepulauan Riau telah memperlihatkan kesiapannya untuk mendukung program kerja Presiden Joko Widodo. Kedua provinsi menyatakan kesiapannya untuk mengusulkan sektor ekonomi apa saja yang perlu dukungan modal asing terutama untuk sektor infrastruktur sesuai dengan karakteristik geografis kedua provinsi tersebut. Prioritas program pembangunan yang dicanangkan Presiden Joko Widodo nampaknya mendapat dukungan dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Dari hasil penelitian terlihat bahwa kedua provinsi telah siap untuk mengembangkan sektor pariwisata, perdagangan dan infrastruktur di wilayahnya. Karena itu, keberhasilan program kerja Presiden Joko Widodo akan sangat ditentukan oleh koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Potensi ekonomi yang dimiliki baik oleh Provinsi Bali dan Kepulauan Riau sangat besar. Untuk sektor perdagangan kedua provinsi telah mempunyai produk-produk tertentu yang siap dipasarkan keluar negeri. Demikian pula untuk sektor pariwisata, kedua provinsi juga telah siap mengembangkan potensi keindahan alamnya untuk wisatawan manca negara maupun dalam negeri. Akan tetapi semuanya belum didukung oleh infrastruktur yang memadai. Pelabuhan laut, bandara, listrik, dan sarana perhubungan lainnya masih memerlukan perhatian pemerintah. Pengembangan infrastruktur ini akan berkorelasi positif terhadap keberhasilan pembangunan di sektor pariwisata maupun perdagangan.

Masyarakat Ekonomi ASEAN sudah mulai berlaku pada tahun 2016 nanti. Berbagai kekurangan yang dimiliki Indonesia harus segera dibenahi agar Indonesia tidak menjadi pasar bagi negara-negara anggota ASEAN lainnya. Untuk mengejar ketertinggalan itu, ada baiknya jika Indonesia memanfaatkan investor asing untuk membangun infrastruktur di Indonesia, tidak harus dengan mengandalkan Tiongkok atau Jepang tetapi juga negara-negara lainnya yang siap bekerjasama dengan Indonesia atas dasar saling menguntungkan. Di lingkungan negara-negara ASEAN, Indonesia sebenarnya bisa memanfaatkan pemodal dari Malaysia dan Singapura untuk membangun infrastruktur di Indonesia.

INDEKS

A

Amerika Serikat, 13, 21, 30, 32, 40, 45, 85, 90, 94
ASEAN, 5, 10, 12, 13, 19, 20, 43, 45, 46, 73, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 94, 99
ASEAN Tourism Investment Forum, 19

B

Badan Infrastruktur Nasional, 92
Bali, 4, 5, 8, 14, 15, 18, 37, 53, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 83, 100
Bangkok, 3
Biaya Logistik, 84, 85, 86, 90
Bilateral Investment Treaty, 43, 69
Brazil, 21, 95

C

Cities Index, 3
CNN, 11
Culture, 3, 4

D

Diplomacy blind spot, 56, 58, 61
Diplomacy for the people, 29
Diplomasi Ekonomi, 4, 5, 6, 7, 8, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 92,

94, 95, 96, 100

Diplomat, 5, 17, 18, 19, 20, 23, 30, 32, 46, 48, 49, 51, 60, 68, 69, 70, 100
Direct diplomacy, 68
Domestic connectivity, 91
Down-to-earth diplomacy, 29

E

Ekologi, 4, 12
Ekonomi global, 30, 35, 39
Event, 4, 49

F

Fasilitas, 5, 6, 8, 9, 15, 18, 22, 31, 41, 42, 48, 91, 97, 98
Foreign Direct Investment, 30, 72, 96
Foreign Policy Breakfast, 47
Forest, 15,

G

Geografis, 5, 14, 16, 38, 52, 79, 80, 82
Global Conectivity, 91
Gunung, 12, 17

H

Handicraft, 45
High technology, 30, 96
Hindia, 38
Hungaria, 21, 95

I

Indonesian Trade Promotion Center, 50
Infrastruktur, 20, 37, 39, 43, 45, 49, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 100
Inggris, 3, 21, 71, 95

J

Jalur, 16, 21, 38, 52, 76
Jaringan, 11, 36, 41, 44, 50, 61, 71, 83, 86, 98
Jasa, 10, 38, 41, 42, 46, 52, 55, 80, 87, 91
Jepang, 21, 40, 45, 94, 95, 96, 98, 99

K

Kawasan strategis nasional, 52, 76, 79
Kepulauan Riau, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 38, 50, 51, 52, 74, 75, 79, 80, 100
Kuala Lumpur, 3

L

Laos, 21, 82
Latvia, 21
Local connectivity, 91
Logistics Performance Index, 89

M

Malaysia, 4, 9, 10, 11, 13, 16, 21, 50, 51, 79, 82, 85, 88, 89, 95,
Market intelligence, 44, 50
Marketer, 18, 23, 30, 46

N

Negara, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53

Nicholas Bayne, 70
Non Tarrieff Barrier, 53

O

Olah raga, 6
Optimal, 6, 7, 29, 31, 46, 58, 60
Oriented, 33

P

Pariwisata, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 36, 37, 38, 41, 43, 48, 69, 74, 87, 100
Perdagangan, 18, 19, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 69, 71, 72, 73, 77, 88, 89, 91, 94, 96, 98, 100
Provinsi, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 37, 38, 50, 51, 52, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 100

Q

Qatar, 21,
Quang Ninh, 12

R

Raja Ampat, 4
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, 86
Resort, 9, 17, 20

S

Sarbagita, 76
Satun Tugas Diplomasi Ekonomi, 48
Seoul, 3
Soft power, 57

T

Tarrief Barrier, 53

Thailand, 3, 4, 21, 82, 85, 88, 89, 95

Tiongkok, 9, 12, 15, 16, 81, 82, 88,
89, 96, 97, 98

U

Ulun Danu, 15

Update From The Region, 7, 18, 19

Usaha Domestik, 7, 19

V

Vatikan, 21

Venezuela, 21, 95

Vietnam, 4, 11, 12, 21, 57, 79, 82, 85,
88, 95

Visa, 20, 21, 23

W

Wisatawan, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23,
68, 96

Wonderful Indonesia, 22

WTO, 43, 54, 94

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Lisbet, adalah Peneliti Muda bidang Hubungan Internasional di Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Menyelesaikan studi S2 di Program Pasca Sarjana FISIP Jurusan Hubungan Internasional Universitas Indonesia pada tahun 2008. Kepakarannya adalah Masalah-Masalah Hubungan Internasional. Beberapa tulisannya antara lain Kepentingan Nasional Amerika Serikat di *Inter-Parliamentary Union* pada tahun 2011, Pentingnya Peran Pelabuhan Hub Internasional Di Indonesia Pada Era Globalisasi pada tahun 2011, Bantuan Luar Negeri di Bidang Energi terbarukan pada tahun 2013 dan Kebijakan Luar Negeri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Dalam Upaya Meningkatkan Kerja Sama Perdagangan Luar Negeri Indonesia pada tahun 2014. Penulis dapat dihubungi pada alamat email: lisbet.sihombing@dpr.go.id

Adirini Pujayanti, Dra., M.Si., adalah Peneliti Madya bidang Masalah-masalah Hubungan Internasional di Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Menyelesaikan studi S1 di Fisip Universitas Nasional tahun 1999. dan menyelesaikan S2 di Kajian Wilayah Amerika di Universitas Indonesia tahun 2002. Anggota tim penulis buku, diantaranya yaitu *Pemanasan Global dan Perubahan Iklim*, Jakarta: Sekertariat Jenderal DPR RI dan Azza Grafika 2009; *Masalah Negara Kepulauan Di Era Globalisasi*, Jakarta: Sekertariat Jenderal DPR RI dan Azza Grafika 2011; *Masalah Penyelundupan dan Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta; Sekertariat Jenderal DPR RI dan Azza Grafika, 2012; *Potensi dan Masalah Pulau Perbatasan – Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Pulau Raja Ampat*, Jakarta: Sekertariat Jenderal DPR RI dan Azza Grafika, 2012; *Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI dan Azza Grafika, 2012; *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*

dan Implikasinya terhadap Indonesia, Sekretariat Jenderal DPR RI dan Azza Grafika, 2013; *Millennium Development Goals Agenda Pembangunan Pasca-2015 dan Peran Parlemen*, Jakarta: Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, 2014.

Drs. Humphrey Wangke M.Si., adalah Peneliti Utama pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Menyelesaikan studi S1 di Fisip Universitas Jember tahun 1988. dan menyelesaikan S2 di Kajian Wilayah Amerika di Universitas Indonesia tahun 1998. Saat ini sedang menyelesaikan program doktoral di Program Studi Ilmu Lingkungan UI. Salah satu karya tulis ilmiah (KTI) yang ditulis adalah “Sekuritisasi Polusi Asap Lintas Batas di Kawasan Asia Tenggara” dalam Prof. (Ris) Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A, (ed.), *Masalah-Masalah Di Kawasan Menjelang Realisasi Komunitas ASEAN 2015*, Azza Grafika, Yogyakarta, 2014.

Presiden Joko Widodo menargetkan bahwa pada akhir masa jabatannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mampu mencapai 7,8 persen pada tahun 2019. Untuk memenuhi target tersebut, Presiden Joko Widodo bukan hanya dituntut untuk membenahi perekonomian dalam negeri Indonesia, terutama yang berkaitan dengan masalah birokrasi, tetapi juga mendorong dunia diplomasi Indonesia menjadi garda terdepan dalam menghadapi perekonomian dunia yang semakin kompetitif. Untuk itulah Presiden Joko Widodo mendorong Kementerian Luar Negeri Indonesia agar lebih aktif mencari peluang ekonomi di luar negeri. Presiden Joko Widodo tidak menginginkan diplomat Indonesia bekerja untuk urusan seremonial belaka tetapi yang terpenting adalah menjadi “mata dan telinga” Indonesia di luar negeri.

Buku ini membahas analisis pada sektor perdagangan, infrastruktur dan pariwisata. Dipilihnya ke tiga sektor ini tidak terlepas dari peluang dan tantangan yang dihadapi Indonesia. Melalui KTI ini para peneliti menganalisis peluang dan tantangan yang mungkin harus dihadapi Indonesia melalui pendekatan diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Di tingkat kawasan, diplomasi ekonomi Indonesia akan terus berupaya memaksimalkan manfaat dan kerja sama ASEAN dan APEC khususnya untuk mendukung konektivitas dan pembangunan. Dalam konteks multilateral, diplomasi ekonomi Indonesia akan memanfaatkan forum-forum organisasi internasional seperti G-20 dan WTO. Satuan Tugas yang dibentuk oleh Kementerian Luar Negeri akan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga lainnya untuk memastikan kerja sama pembangunan dan kesepakatan-kesepakatan ekonomi di bidang pariwisata, perdagangan dan investasi dengan negara lain dapat segera ditindaklanjuti.



Diterbitkan oleh :
P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika



ISBN 978-602-1247-29-7



9 786021 247297